Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development
E-ISSN: 2655-0865
DINASTI RESEARCH
082170743613 ranahresearch@gmail.com https://jurnal.ranahresearch.com

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.v8i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pola Klientelisme dan Distribusi Akses SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis

Ibrahim Askar[1]
[1]Program Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia
ibrahimabdhamidaskar@gmail.com

Corresponding Author: ibrahimabdhamidaskar@gmail.com[1]

Abstract: This article analyzes the practice of clientelism in the governance of the Free Nutritious Meals (*Makan Bergizi Gratis*, MBG) program, particularly through the distribution of access to the Nutritional Fulfillment Service Units (*Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi*, SPPG). The study employs a qualitative approach using document analysis of reports published by Indonesia Corruption Watch (ICW), Tempo, and other supporting documents. The analysis applies Kitschelt and Wilkinson's (2007) citizen–politician linkages framework. The findings show that access to SPPG management is distributed selectively to actors with political ties to the government, including party cadres, 2024 presidential campaign volunteers, political elites, military, and police networks. This pattern reflects clientelistic practices through patronage distribution, loyalty targeting, and monitoring mechanisms based on political networks. The study also finds an absence of competency-based standards in selecting SPPG partners, resulting in governance that prioritizes political proximity over technical capacity. Consequently, the MBG program becomes vulnerable to conflicts of interest, rent-seeking practices, and public service failures, including cases of mass food poisoning among beneficiaries. The article concludes that the MBG program has the potential to function as a medium for consolidating political patronage in Indonesia's post-2024 electoral landscape.

Keywords: clientelism, political patronage, MBG, SPPG, citizen–politician linkages.

Abstrak: Artikel ini menganalisis praktik klientelisme dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya melalui distribusi akses pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap laporan investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tempo, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan menggunakan kerangka citizen–politician linkages dari Kitschelt dan Wilkinson (2007). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa distribusi akses SPPG cenderung berlangsung secara selektif kepada aktor yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintahan, mulai dari kader partai, relawan Pilpres 2024, hingga jaringan elite politik, militer, dan kepolisian. Pola ini mengindikasikan adanya kecenderungan klientelistik melalui distribusi patronase, penargetan loyalitas politik, dan mekanisme pengawasan berbasis jaringan kekuasaan. Penelitian ini juga menemukan absennya standar kompetensi dalam penentuan mitra SPPG, sehingga pengelolaan program

cenderung lebih didasarkan pada kedekatan politik dibanding kapasitas teknis. Kondisi tersebut berpotensi membuat tata kelola MBG rentan terhadap konflik kepentingan dan praktik rente. Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa MBG berpotensi menjadi medium konsolidasi patronase politik dalam lanskap kekuasaan pasca Pemilu 2024.

Kata kunci: klientelisme, patronase politik, MBG, SPPG, citizen–politician linkages.

PENDAHULUAN

Praktik klientelisme merupakan salah satu persoalan mendasar dalam konsolidasi demokrasi di banyak negara berkembang (Stokes et al., 2013; Kitschelt & Wilkinson, 2007). Dalam sistem demokrasi yang terinstitusionalisasi secara kuat, kompetisi politik umumnya berlangsung melalui pertarungan program, ideologi, serta kapasitas kebijakan yang ditawarkan kepada publik secara universal (Kitschelt, 2000; programmatic politics). Namun dalam konteks demokrasi yang bercorak patronase, hubungan antara aktor politik dan masyarakat lebih sering dibangun melalui distribusi manfaat material yang bersifat selektif, personalistik, dan bergantung pada loyalitas politik tertentu (Kitschelt & Wilkinson, 2007; Piattoni, 2001). Pola relasi semacam ini menempatkan akses terhadap sumber daya negara sebagai instrumen utama untuk mempertahankan dukungan politik, sehingga batas antara kebijakan publik dan kepentingan politik elektoral menjadi semakin kabur (Scott, 1972; Hopkin, 2006).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan demokrasi pasca-Reformasi 1998 menunjukkan bahwa desentralisasi politik dan ekonomi tidak secara otomatis menghilangkan praktik patronase yang telah mengakar sejak era sebelumnya (Hadiz, 2010; Robison & Hadiz, 2004). Berbagai studi justru menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan membuka ruang baru bagi munculnya jejaring klientelistik yang lebih terfragmentasi dan tersebar di berbagai level pemerintahan, mulai dari tingkat nasional hingga lokal (Aspinall & Sukmajati, 2016; Aspinall & Berenschot, 2019; Mietzner, 2013; Hadiz, 2010). Distribusi sumber daya publik kerap dimanfaatkan untuk membangun loyalitas politik melalui hubungan personal, jaringan bisnis-politik, maupun kedekatan dengan elite kekuasaan lokal dan nasional (Hadiz, 2003; Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam situasi demikian, program-program negara yang memiliki anggaran besar dan jangkauan sosial luas menjadi arena strategis bagi reproduksi patronase politik (Hicken, 2011; Stokes et al., 2013).

Fenomena tersebut kemudian menjadi relevan untuk membaca dinamika Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang mulai dilaksanakan sejak Januari 2025. Program ini diposisikan sebagai agenda utama pemerintah dalam bidang pemenuhan gizi dan kesejahteraan sosial, dengan target menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Besarnya cakupan program diikuti dengan peningkatan anggaran yang sangat signifikan, dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun pada 2026 (BGN, 2025; Muhamad, 2025). Implementasi MBG ini dijalankan melalui ribuan unit dapur yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dimana setiap unit dikelola oleh yayasan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp 144 juta per bulan (Mardianti & Chairunnisa, 2026).

Besarnya sumber daya yang dialokasikan dalam program ini kemudian memunculkan perhatian serius terkait tata kelola, transparansi, dan pola distribusi akses terhadap pengelolaan program. Sejumlah laporan investigatif memperlihatkan bahwa mekanisme penunjukan yayasan mitra SPPG memperlihatkan keterhubungan yang kuat dengan jejaring politik dan kekuasaan di sekitar pemerintahan. Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW, 2025) terhadap 102 yayasan pengelola SPPG di 38 provinsi menemukan adanya pola kedekatan antara pengelola program dengan aktor politik, tim kampanye Prabowo–Gibran,

unsur militer, kepolisian, serta lingkaran personal elite negara. Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pengelolaan program lebih banyak ditentukan oleh kedekatan jaringan dibandingkan kapasitas profesional atau pengalaman teknis dalam pengelolaan pangan dan pelayanan publik.

Sementara itu, laporan investigasi Tempo (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan keterlibatan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sebagai salah satu mitra Badan Gizi Nasional. Yayasan ini memiliki hubungan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan diisi oleh sejumlah figur yang berasal dari lingkaran elite pemerintahan, keluarga, maupun jaringan bisnis-politik nasional. Keterhubungan antara program negara, yayasan pelaksana, dan elite politik ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan kesejahteraan berpotensi menjadi medium konsolidasi jaringan patronase dalam struktur kekuasaan baru pasca-Pilpres 2024.

Kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan dalam tata kelola MBG disampaikan secara terbuka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional. Pernyataan mengenai adanya indikasi "perlakuan khusus" dalam penentuan SPPG menunjukkan bahwa persoalan tata kelola program telah menjadi perhatian institusional di tingkat nasional (Raden & Trianita, 2025). Situasi ini telah mengonfirmasi bahwa distribusi sumber daya publik dalam program kesejahteraan berskala besar memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik klientelisme ketika mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan standar seleksi kelembagaan tidak berjalan secara terbuka dan kompetitif.

Berangkat dari konteks tersebut, artikel ini berargumen bahwa Program MBG berpotensi sebagai instrumen reproduksi dan konsolidasi jejaring klientelistik dalam konfigurasi kekuasaan pasca-Pilpres 2024. Pola penunjukan yayasan pengelola SPPG menunjukkan bahwa distribusi akses terhadap sumber daya publik berlangsung melalui relasi kedekatan politik, loyalitas personal, dan keterhubungan dengan elite kekuasaan, sehingga mekanisme implementasi program lebih mencerminkan logika patronase dibandingkan prinsip tata kelola yang berbasis kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan. Untuk menjelaskan dinamika ini, artikel ini menggunakan kerangka *citizen–politician linkages* yang dikembangkan oleh Kitschelt dan Wilkinson (2007) guna menganalisis mekanisme distribusi manfaat dalam program MBG membentuk hubungan politik yang bersifat selektif, personalistik, dan eksklusif. Analisis dalam artikel ini bertumpu pada laporan investigasi Indonesia Corruption Watch (2025) dan Tempo (2025) sebagai sumber data utama karena keduanya menyediakan dokumentasi empiris paling komprehensif mengenai jejaring aktor, pola distribusi akses, dan relasi kekuasaan dalam pelaksanaan program MBG.

Kerangka Teori

Artikel ini menggunakan kerangka *citizen–politician linkages* dikembangkan oleh Kitschelt dan Wilkinson (2007). Kerangka ini berangkat dari kritik terhadap model *responsible party government* yang memandang demokrasi sebagai arena kompetisi programatik berbasis kebijakan universal. Menurut mereka, asumsi tersebut tidak sepenuhnya mampu menjelaskan praktik demokrasi di banyak negara berkembang, dimana hubungan antara warga dan politisi justru lebih sering dibangun melalui pertukaran sumber daya yang bersifat personalistik dan selektif. Oleh karena itu, fokus utama teori ini terletak pada variasi mekanisme hubungan antara warga dan politisi (*citizen–politician linkages*), khususnya perbedaan antara hubungan programatik dan hubungan klientelistik. Dalam hubungan programatik, distribusi manfaat dilakukan secara impersonal dan universal melalui kebijakan publik yang berlaku luas. Sebaliknya, dalam hubungan klientelistik, distribusi manfaat bersifat langsung, selektif, dan bergantung pada loyalitas atau dukungan politik tertentu (Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Kitschelt dan Wilkinson menjelaskan bahwa klientelisme bekerja melalui mekanisme pertukaran bersyarat (*contingent exchange*) antara aktor politik dan penerima manfaat. Pertukaran tersebut dapat melibatkan berbagai bentuk sumber daya, mulai dari pekerjaan sektor publik, akses terhadap proyek pemerintah, perlindungan hukum, hingga distribusi kontrak dan subsidi yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Dalam konteks ini, sumber daya negara diperlakukan sebagai *club goods*, yakni manfaat yang tidak didistribusikan secara universal, tetapi diberikan secara selektif kepada individu atau kelompok yang memiliki keterhubungan politik tertentu. Pola pertukaran ini mensyaratkan adanya tingkat prediktabilitas perilaku penerima manfaat, karena aktor politik perlu memastikan bahwa distribusi sumber daya menghasilkan dukungan politik yang diharapkan. Oleh sebab itu, klientelisme umumnya berkembang melalui jejaring sosial, kedekatan personal, organisasi informal, maupun struktur patronase yang memungkinkan proses identifikasi, distribusi, dan pengendalian loyalitas politik berlangsung berulang dan berkelanjutan (Kitschelt & Wilkinson, 2007, pp. 9–18).

Teori *citizen–politician linkages* digunakan untuk menganalisis pola distribusi akses terhadap pengelolaan SPPG dalam Program MBG. Akses terhadap pengelolaan SPPG dipahami sebagai bentuk distribusi *club goods* karena melibatkan insentif operasional bernilai besar serta peluang ekonomi dalam rantai pasok program yang hanya dapat diakses oleh aktor tertentu. Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana distribusi akses tersebut berlangsung berdasarkan kedekatan politik dan relasi patronase, bukan melalui mekanisme yang terbuka, kompetitif, dan berbasis kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, teori Kitschelt dan Wilkinson memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi karakter klientelistik dalam tata kelola program MBG melalui analisis terhadap pola selektivitas distribusi manfaat, keterhubungan politik penerima akses, serta relasi pertukaran yang terbentuk antara aktor negara dan jejaring pendukung politik di sekitar program tersebut.

Dalam penelitian ini, kerangka citizen–politician linkages Kitschelt dan Wilkinson (2007) dioperasionalkan melalui lima indikator empiris untuk mengidentifikasi pola klientelistik dalam distribusi akses SPPG: (1) afiliasi formal dengan partai politik atau organisasi pendukung pemerintahan; (2) keterlibatan dalam tim kampanye atau jaringan relawan Pilpres 2024; (3) kedekatan personal atau hubungan kekerabatan dengan pejabat negara; (4) posisi ganda sebagai regulator dan penerima manfaat (konflik kepentingan); serta (5) keterlibatan institusional aparat negara (militer, kepolisian) di luar tupoksi utamanya. Kehadiran satu atau lebih indikator tersebut pada struktur yayasan pengelola SPPG dipandang sebagai penanda distribusi yang bersifat selektif dan berpotensi klientelistik, sebagaimana

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk menganalisis pola klientelisme dalam implementasi Program MBG. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami relasi politik, pola distribusi akses, serta keterhubungan antaraktor yang tidak dapat dijelaskan melalui pengukuran kuantitatif semata (Creswell, 2014; Yin, 2018) Dalam penelitian ini, analisis dokumen digunakan karena objek kajian terefleksi dalam berbagai data sekunder, seperti laporan investigasi, dokumen kelembagaan, pemberitaan media, dan data resmi pemerintah, yang memerlukan interpretasi teoritis untuk mengidentifikasi karakter hubungan klientelistik dalam tata kelola MBG.

Sumber data utama penelitian ini berasal dari dua laporan investigatif. Pertama, laporan ICW (2025) berjudul “Ada Siapa di Balik MBG?: Politik Patronase untuk Memperkuat Dukungan.” Laporan tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap 102 yayasan mitra penyelenggara MBG yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan representasi wilayah di 38 provinsi. ICW memperoleh data kepengurusan yayasan melalui

akta resmi yang diunduh dari laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, kemudian melakukan verifikasi silang dengan berbagai dokumen publik dan informasi pendukung lainnya. Temuan dalam laporan tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori afiliasi politik dan kelembagaan untuk memetakan pola keterhubungan antara pengelola SPPG dengan jejaring kekuasaan tertentu. Sumber data utama kedua adalah laporan investigasi Tempo (2025) berjudul "Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis," yang memuat temuan mengenai keterlibatan lingkaran personal Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan program MBG, termasuk kesaksian langsung dari sejumlah pengelola SPPG terkait proses penunjukan dan pengelolaan yayasan mitra.

Selain kedua laporan tersebut, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa pemberitaan media nasional, serta dokumen resmi pemerintah terkait anggaran dan mekanisme pelaksanaan MBG. Data-data tersebut dianalisis menggunakan kerangka *citizen–politician linkages* dari Kitschelt dan Wilkinson (2007) untuk mengidentifikasi pola distribusi manfaat yang bersifat selektif, personalistik, dan terkait dengan kedekatan politik tertentu. Praktik klientelisme sering kali beroperasi melalui mekanisme *implicit exchange*, dimana ekspektasi timbal balik antara pemberi dan penerima manfaat terbentuk secara informal tanpa pernyataan terbuka (Kitschelt dan Wilkinson, 2007). Oleh karenanya, pola afiliasi antara pengelola SPPG dan jejaring politik tertentu dipandang sebagai indikator empiris yang relevan untuk mengidentifikasi praktik klientelisme dalam implementasi program MBG.

Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti prosedur sistematis. Pada tahap pertama, seluruh temuan dalam laporan ICW dan Tempo diidentifikasi dan dikategorisasi berdasarkan jenis afiliasi yang terungkap, meliputi afiliasi partai politik, keterlibatan kampanye, hubungan kekerabatan, keterlibatan institusi keamanan, konflik kepentingan internal, dan afiliasi bisnis non-pangan. Pada tahap kedua, kategori-kategori tersebut dipetakan ke dalam tiga dimensi klientelisme Kitschelt dan Wilkinson (2007), yakni contingent direct exchange, predictability dan elasticity, serta monitoring dan enforcement. Pada tahap ketiga, dilakukan interpretasi teoritis terhadap pola yang teridentifikasi untuk menilai sejauh mana distribusi akses SPPG menunjukkan kecenderungan klientelistik. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan analisis interpretatif berbasis dokumen, bukan pembuktian empiris lapangan. Konsekuensinya, temuan yang disajikan bersifat indikatif dan menunjukkan kecenderungan pola klientelistik, bukan membuktikan kausalitas secara definitif. Keterbatasan utama sumber investigatif yang digunakan adalah bahwa laporan ICW hanya mencakup 102 dari ribuan yayasan mitra SPPG yang beroperasi secara nasional, sehingga generalisasi harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, sifat investigatif kedua sumber utama berpotensi mengandung bias seleksi terhadap kasus-kasus yang paling problematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Patronase dan Tata Kelola Selektif Dalam Program MBG

Sebelum menganalisis dimensi-dimensi klientelisme dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), penting untuk melihat terlebih dahulu pola umum yang muncul dari temuan ICW dan investigasi Tempo. Kedua sumber tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan SPPG didominasi oleh yayasan dan individu yang memiliki keterhubungan politik, bisnis, maupun kedekatan personal dengan lingkaran kekuasaan. ICW menyimpulkan bahwa pelaksanaan MBG "diduga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan" karena adanya hubungan antara yayasan penyelenggara dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, militer, dan aparat penegak hukum (ICW, 2025, p. 3).

Sementara itu, investigasi Tempo memerlihatkan pola tersebut secara lebih konkret melalui kasus dapur SPPG Kebayunan di Depok, Jawa Barat yang dikelola oleh PT GSI Kebayunan yang berada di bawah Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yayasan

yang didirikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diisi oleh anggota keluarga serta lingkaran dekatnya, seperti Hashim Djojohadikusumo, Ragowo Hediprasetyo, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Simon Aloysius Mantiri. Selain itu, Tempo juga menemukan keterlibatan sejumlah yayasan yang dipimpin oleh kader Partai Gerindra, relawan Prabowo–Gibran, maupun tokoh bisnis yang mendukung pasangan tersebut dalam Pilpres 2024. Pengakuan beberapa pengelola yayasan bahwa mereka dilibatkan karena posisi mereka sebagai kader atau pendukung pemerintahan menunjukkan bahwa akses terhadap proyek negara dipahami sebagai bagian dari hubungan timbal balik politik. Dalam kerangka *citizen–politician linkages* Kitschelt dan Wilkinson (2007), pola ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya publik menunjukkan kecenderungan bergerak ke arah hubungan klientelistik, dimana manfaat diberikan kepada aktor yang memiliki keterikatan politik dengan patron kekuasaan.

Temuan ICW dan Tempo juga memperlihatkan bahwa pola patronase dalam MBG meluas hingga persoalan konflik kepentingan dan lemahnya standar kompetensi. ICW menemukan keterlibatan tenaga ahli Badan Gizi Nasional (BGN) dalam yayasan penyedia SPPG, sehingga aktor yang memiliki fungsi pengawasan justru ikut menjadi penerima manfaat program. Selain itu, sejumlah yayasan diketahui memiliki afiliasi dengan institusi militer, kepolisian, maupun individu yang pernah terlibat dalam kasus korupsi (ICW, 2025, p. 21). Di sisi lain, afiliasi bisnis para pengelola yayasan justru banyak berasal dari sektor non-pangan seperti pertambangan, properti, telekomunikasi, konstruksi, dan otomotif (ICW, 2025, p. 20). Investigasi Tempo bahkan menemukan praktik subkontrak kepada perusahaan katering lain karena banyak yayasan tidak memiliki kapasitas dapur maupun tenaga pengolahan makanan sendiri. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan MBG cenderung menyerupai distribusi akses ekonomi-politik dibandingkan tata kelola program kesejahteraan berbasis kompetensi.

Terlihat jelas bahwa distribusi akses terhadap SPPG berlangsung melalui hubungan yang bersifat personalistik, selektif, dan berbasis loyalitas politik. Relasi ini kemudian diperkuat oleh insentif ekonomi yang besar, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kaburnya batas antara aktor negara dan penerima manfaat program. Berdasarkan pola-pola ini, bagian berikutnya akan menganalisis implementasi MBG melalui tiga dimensi utama klientelisme dalam kerangka *citizen–politician linkages*, yakni *contingent direct exchange, predictability and elasticity,* serta *monitoring and enforcement* (Kitschelt dan Wilkinson, 2007).

Distribusi Patronase, Penargetan Loyalitas, dan Mekanisme Pengendalian dalam Pogram MBG

Temuan ICW dan investigasi Tempo menunjukkan bahwa distribusi akses pengelolaan SPPG dalam program MBG memperlihatkan pola patronase politik yang terstruktur dan berlapis. Akses terhadap proyek negara tidak terdistribusi secara universal melalui mekanisme kompetitif berbasis kapasitas teknis, melainkan cenderung diberikan kepada aktor-aktor yang memiliki kedekatan politik, afiliasi elektoral, maupun keterhubungan personal dengan lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kerangka Kitschelt dan Wilkinson (2007), praktik klientelisme dimana sumber daya publik dialokasikan secara selektif kepada individu atau kelompok yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan pendukung politik penguasa. Relasi tersebut mengandung logika pemeliharaan loyalitas, perluasan koalisi, dan mekanisme pengawasan terhadap para penerima manfaat.

Misalnya dalam kasus pengelolaan dapur SPPG Kebayunan di Depok menjadi ilustrasi paling jelas mengenai pola tersebut. Investigasi Tempo menemukan bahwa dapur tersebut berada di bawah PT GSI Kebayunan yang terafiliasi dengan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yayasan yang didirikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Struktur kepengurusan yayasan tersebut memperlihatkan keterlibatan keluarga inti

dan lingkaran personal presiden. Dalam perspektif klientelisme, keterhubungan personal semacam ini penting karena memperlihatkan bahwa akses terhadap sumber daya negara bergerak melalui jaringan loyalitas dan kedekatan patronase, bukan melalui prosedur administratif yang kompetitif. Fenomena ini sejalan dengan argumen Stokes et al. (2013) bahwa klientelisme modern bekerja melalui distribusi akses ekonomi dan proyek negara kepada broker politik, loyalis, maupun jaringan elite yang menopang kekuasaan penguasa. Pada saat yang sama, keterlibatan yayasan yang didirikan langsung oleh presiden juga memperlihatkan kuatnya dimensi *predictability* dalam hubungan klientelistik. Kitschelt dan Wilkinson (2007) menegaskan bahwa distribusi patronase cenderung diarahkan pada aktor yang memiliki tingkat loyalitas tinggi dan dapat diprediksi perilaku politiknya. Dalam konteks ini, menjadi masuk akal ketika keluarga inti dan lingkaran personal presiden merupakan kelompok dengan tingkat kepercayaan politik tertinggi sehingga menjadi penerima akses paling aman secara politik.

Pola tersebut tidak berdiri sebagai kasus yang terisolasi. Laporan ICW menunjukkan bahwa dari 102 yayasan mitra MBG yang ditelusuri, sebanyak 28 yayasan memiliki afiliasi politik formal. Partai Gerindra menjadi kelompok dengan afiliasi paling dominan melalui keterlibatan kader, calon legislatif, maupun pengurus organisasi pendukung partai (ICW, 2025, p. 7). Investigasi Tempo (2025) menemukan bahwa Yayasan Vieki Indira Sriwijaya di Sumatera Selatan dipimpin oleh Tri Yulia Rizki Ananda, mantan calon anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Di Nusa Tenggara Timur, Yayasan Sejahtera Desaku dikelola oleh Kosmas Semen Janggat yang juga pernah maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi dari Gerindra. Pengakuan Kosmas bahwa yayasannya "akhirnya dilibatkan karena sebagai kader tidak ingin melihat program ini gagal" menunjukkan bahwa identitas politik berfungsi sebagai dasar legitimasi akses terhadap proyek negara.

Dalam konteks ini, status sebagai kader atau pendukung pemerintahan juga menjadi modal yang dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi melalui pengelolaan program negara. Fenomena ini memperlihatkan bekerjanya mekanisme *contingent exchange*, yaitu ketika akses terhadap sumber daya publik diberikan sebagai imbalan atas loyalitas dan kontribusi politik sebelumnya. Namun lebih dari itu, keterlibatan kader dan relawan juga memperlihatkan logika *predictability* dan e*lasticity* sebagaimana dijelaskan Kitschelt & Wilkinson (2007). Jaringan yang telah terbukti memberikan mobilisasi elektoral pada Pilpres 2024 dipandang sebagai konstituen yang paling dapat dipercaya untuk terus mempertahankan dukungan politik terhadap pemerintahan baru. Dengan kata lain, distribusi akses SPPG tidak di sini ditempatkan sebagai investasi menjaga keberlanjutan loyalitas politik di masa depan.

Logika serupa terlihat dalam keterlibatan organisasi relawan dan tim sukses Pilpres 2024 dalam proyek MBG. ICW menemukan keterhubungan sejumlah yayasan dengan Relawan Muda Prabowo-Gibran, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, serta kelompok relawan seperti NGOPI (Ngobrolin Prabowo-Gibran untuk Indonesia) (ICW, 2025, pp. 12-14). Investigasi Tempo turut menemukan keterlibatan Yayasan Prabu Center yang didirikan oleh Lenis Kogoya dan Abednego Panjaitan, keduanya terkait dengan jaringan pendukung Prabowo-Gibran. Lenis bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dirinya memerintahkan pengurus yayasan untuk "mengawal" program Presiden Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan bahwa distribusi akses SPPG dipahami sebagai bagian dari hubungan timbal balik politik antara patron dan jaringan pendukungnya. Dalam literatur klientelisme, pola seperti ini dikenal sebagai *reward distribution*, yaitu penggunaan sumber daya negara untuk mempertahankan loyalitas aktor-aktor yang sebelumnya telah berkontribusi dalam mobilisasi politik (Piattoni, 2001). Akan tetapi, hubungan tersebut tidak berhenti pada distribusi manfaat semata. Pernyataan Lenis bahwa "kemampuan pemerintah terbatas juga" mengindikasikan adanya kalkulasi politik mengenai pentingnya melibatkan jaringan pendukung dalam implementasi program negara. Di sini terlihat bagaimana program kesejahteraan berfungsi sekaligus sebagai instrumen integrasi politik. Dengan melibatkan relawan dan broker politik

dalam proyek MBG, pemerintah di sini menciptakan ketergantungan politik yang memperkuat kohesi koalisi pendukung pemerintahan.

Menariknya, pola distribusi akses tersebut tidak terbatas pada jaringan inti pendukung Prabowo saja. ICW menemukan bahwa sejumlah yayasan penerima akses juga memiliki keterhubungan dengan relawan Joko Widodo maupun jaringan Anies-Muhaimin. Yayasan Berkat Gemilang Nusantara dan Yayasan Organisasi Masyarakat Sipil Barisan Rakyat Peduli, misalnya, terhubung dengan kelompok "Setia Jokowi", sedangkan Yayasan Insan Cendikia Jayapura dan Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua memiliki keterkaitan dengan jaringan pendukung Anies-Muhaimin (ICW, 2025, 13-14). Temuan ini memperlihatkan bahwa distribusi patronase dalam MBG juga mengandung logika ekspansi koalisi. Dalam perspektif Kitschelt dan Wilkinson (2007), klientelisme di sini berfungsi untuk memperluas basis dukungan dengan menginkorporasi aktor-aktor dari spektrum politik yang lebih luas ke dalam jaringan ketergantungan ekonomi-politik. Fenomena ini sejalan dengan argumen Piattoni (2001) bahwa patronase modern sering kali berfungsi sebagai mekanisme integrasi elite, dimana distribusi sumber daya negara digunakan untuk meredam potensi oposisi sekaligus memperluas stabilitas politik pemerintahan. Dengan demikian, MBG menjadi arena konsolidasi politik pasca pemilu.

Lebih jauhnya lagi, dimensi klientelistik dalam distribusi akses MBG juga terlihat dari konflik kepentingan di internal BGN. ICW menemukan bahwa Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) didirikan oleh I Dewa Made Agung Kertha yang merupakan Tenaga Ahli BGN, sedangkan Yayasan No Fito Timor didirikan oleh Florencio Mario Vieira yang juga merupakan Tenaga Ahli BGN (ICW, 2025, pp. 14-16). Di sini terdapat batas yang kabur antara regulator, pengawas, dan penerima manfaat program. Dalam perspektif teori patronase, situasi tersebut menunjukkan terjadinya *state capture*, yaitu ketika institusi publik digunakan untuk mengalokasikan keuntungan kepada jaringan internal yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan (Grindle, 2012). Pada saat yang sama, posisi aktor yang sekaligus menjadi pengawas dan penerima manfaat juga memperlihatkan bekerjanya mekanisme *monitoring* dan *enforcemen*t dalam hubungan klientelistik. Kitschelt & Wilkinson (2007) menekankan bahwa patronase membutuhkan mekanisme pengawasan agar para penerima manfaat tetap berada dalam orbit loyalitas patron. Ketika aktor internal BGN sendiri terlibat sebagai penerima akses, mekanisme pengawasan menjadi bersifat tertutup dan *self-enforcing* karena pengawas sekaligus merupakan bagian dari jaringan distribusi manfaat tersebut. Dengan demikian, kontrol terhadap program bekerja melalui loyalitas personal dan kepentingan bersama dalam mempertahankan akses terhadap sumber daya negara.

Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan dan pengendalian loyalitas juga tampak dalam keterlibatan institusi keamanan negara dalam program MBG. ICW mencatat keterlibatan masif TNI dan Polri dalam pengelolaan SPPG, dengan TNI mengelola ratusan unit dapur dan menargetkan ekspansi hingga ribuan unit, sementara Polri juga mengoperasikan ratusan SPPG di berbagai daerah. Keterlibatan institusi keamanan menciptakan bentuk *group monitoring* yang sangat efektif karena kepatuhan terhadap program berjalan melalui rantai komando institusional. Dalam konteks ini, loyalitas terhadap program pemerintah menjadi sulit dipisahkan dari loyalitas terhadap pimpinan institusi dan presiden sebagai otoritas tertinggi. ICW juga menemukan bahwa Yayasan Kemala Bhayangkari yang mengelola SPPG dipimpin oleh istri Wakapolri dengan struktur pembina yang diisi keluarga elite Polri. Selain itu, Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan diisi oleh figur-figur militer aktif dan purnawirawan yang memiliki keterhubungan langsung dengan elite pertahanan dan Partai Gerindra (ICW, 2025, pp. 9-11). Konfigurasi tersebut memperlihatkan bagaimana relasi patronase bekerja melalui jaringan institusional dan kekerabatan sekaligus, sehingga pengawasan terhadap loyalitas tidak memerlukan mekanisme formal yang mahal. Dalam terminologi Kitschelt dan Wilkinson, situasi ini menciptakan *self-enforcing equilibrium*, yaitu kondisi dimana besarnya manfaat

dan kedekatan jaringan membuat para penerima akses memiliki insentif kuat untuk tetap loyal tanpa perlu pengawasan eksplisit.

Indikasi lain dari bekerjanya patronase politik terlihat dari kemunculan yayasan-yayasan baru menjelang implementasi MBG. Investigasi Tempo (2025) menemukan bahwa sejumlah yayasan mitra dibentuk hanya tiga hingga empat bulan sebelum program resmi diluncurkan pada Januari 2025, bahkan beberapa di antaranya secara eksplisit mencantumkan tujuan pendirian untuk menjalankan program makan bergizi. Fakta ini mengindikasikan bahwa pembentukan organisasi dilakukan secara instrumental untuk mengakses proyek negara yang baru akan berjalan. Dalam kajian patronase politik, pembentukan organisasi temporer guna memperoleh akses terhadap distribusi sumber daya publik merupakan karakteristik umum dari jaringan klientelistik berbasis proyek (Kopecký, Mair, & Spirova, 2012). Yayasan-yayasan tersebut berfungsi sebagai kendaraan administratif untuk menyalurkan akses ekonomi kepada jaringan politik tertentu, bukan sebagai organisasi sosial yang dibangun atas kebutuhan pelayanan publik jangka panjang.

Distribusi patronase dalam MBG juga semakin diperkuat oleh besarnya insentif ekonomi yang tersedia. Berdasarkan investigasi Tempo (2025), Tenaga Ahli Kepala BGN, Abdul Gofur Ahmad, menghitung bahwa setiap dapur MBG dapat menghasilkan keuntungan sekitar Rp120 juta per bulan dari minimal 3.000 porsi per hari dengan margin Rp2.000 per porsi. Nilai tersebut dapat meningkat berlipat ganda apabila satu yayasan mengelola lebih dari satu dapur. Besarnya potensi keuntungan ini membuat pengelolaan SPPG menjadi sumber rente ekonomi yang sangat menarik bagi jaringan politik dan broker patronase. Sebetulnya kondisi ini sedikit banyak tergambarkan ketika Ketua Kadin Anindya Bakrie mempromosikan konsep “MBG-nomics” dengan menyatakan bahwa pembangunan ratusan dapur MBG oleh anggota Kadin mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, di balik narasi tersebut, akumulasi keuntungan terbesar justru berpotensi terkonsentrasi pada aktor-aktor yang menguasai kontrak dapur, rantai pengadaan bahan pangan, dan jaringan distribusi program MBG, sementara pekerja operasional hanya menempati posisi sebagai penerima manfaat ekonomi yang terbatas (Arif, 2026). Dalam perspektif Kitschelt dan Wilkinson, manfaat material semacam ini menciptakan kondisi dimana loyalitas politik menjadi semakin mudah dipertahankan karena para penerima manfaat memiliki ketergantungan ekonomi terhadap keberlanjutan akses proyek negara. Dengan demikian, program kesejahteraan yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik bertransformasi menjadi arena distribusi patronase yang memperkuat jaringan loyalitas politik.

Indikasi lain dari pertukaran bersyarat terlihat dari kemunculan yayasan-yayasan baru menjelang implementasi MBG. Investigasi Tempo (2025) menemukan bahwa sejumlah yayasan mitra dibentuk hanya tiga hingga empat bulan sebelum program resmi diluncurkan pada Januari 2025. Beberapa yayasan bahkan secara eksplisit mencantumkan tujuan pendiriannya untuk menjalankan program makan bergizi. Fakta ini mengindikasikan bahwa pembentukan organisasi dilakukan secara instrumental untuk mengakses proyek negara yang baru akan berjalan. Dalam kajian patronase politik, pembentukan organisasi temporer guna memperoleh akses terhadap distribusi sumber daya publik merupakan karakteristik umum dari jaringan klientelistik yang berbasis proyek (Kopecký, Mair, & Spirova, 2012). Yayasan-yayasan ini berfungsi sebagai kendaraan administratif untuk menyalurkan akses ekonomi kepada jaringan politik tertentu.

Lebih jauh lagi, distribusi akses SPPG di sini memerlihatkan dimensi personalistik yang kuat. Abednego Panjaitan mengakui kepada Tempo bahwa Hashim Djojohadikusumo pernah memintanya secara langsung untuk “mengawal dan menyukseskan proyek makan bergizi.” Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa hubungan patronase tidak semata-mata berlangsung melalui institusi formal negara, tetapi juga melalui komunikasi personal antaraktor elite. Dalam sistem klientelistik, hubungan personal semacam ini

memiliki fungsi sentral karena menciptakan rasa kedekatan, loyalitas, dan kewajiban timbal balik antara patron dan klien (Eisenstadt & Roniger, 1984). Akibatnya, distribusi sumber daya negara menjadi semakin bergantung pada relasi informal dibandingkan prosedur birokratis yang transparan.

Absennya Standar Kompentensi: Konfirmasi Empiris Klientelisme

Salah satu indikator penting untuk mengidentifikasi bekerjanya klientelisme adalah dengan melihat dasar distribusi akses terhadap sumber daya negara. Dalam sistem yang bersifat programatik, distribusi manfaat publik seharusnya didasarkan pada kriteria universal, kompetensi teknis, serta prosedur administratif yang transparan. Sebaliknya, dalam sistem klientelistik, kedekatan politik sering kali menjadi faktor utama yang menentukan siapa yang memperoleh akses, sementara kapasitas profesional justru menjadi pertimbangan sekunder. Kitschelt dan Wilkinson (2007) menegaskan bahwa klientelisme bekerja melalui distribusi manfaat yang bersifat partikularistik dan tidak berbasis prinsip impersonal universalism yang menjadi karakter birokrasi modern. Temuan ICW dan investigasi Tempo menunjukkan bahwa pola pengelolaan SPPG dalam program MBG lebih dekat pada model kedua tersebut.

Laporan ICW (2025) menunjukkan bahwa banyak yayasan dan aktor yang memperoleh akses pengelolaan SPPG justru tidak memiliki latar belakang yang relevan dengan bidang pangan, gizi, maupun layanan katering berskala besar. Dari 18 yayasan yang memiliki keterhubungan bisnis, sektor yang mendominasi justru berasal dari pertambangan emas, telekomunikasi, perikanan, fintech, properti, konstruksi, sawit, hingga otomotif. Sektor kuliner hanya muncul dalam jumlah terbatas, dan bahkan keterlibatan di sektor makanan tersebut tidak otomatis menunjukkan kemampuan mengelola distribusi pangan bergizi untuk ribuan penerima manfaat setiap hari. Komposisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap proyek MBG disusun berdasarkan kemampuan jaringan tertentu untuk memperoleh akses politik terhadap BGN dan lingkaran kekuasaan. Dalam perspektif Grindle (2012), kondisi ini memperlihatkan bagaimana institusi publik dapat bergerak dari logika meritokratis menuju pola distribusi patronase ketika pengalokasian proyek negara tidak lagi ditentukan oleh kompetensi administratif, tetapi oleh relasi politik dan kedekatan elite.

Ini juga menunjukan secara jelas terlihat dari setidaknya terdapat 33.626 pelajar di Indonesia yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG. Temuan ini berdasarkan hasil monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal tahun 2025 hingga April 2026, dengan rincian 28.103 korban keracunan sepanjang tahun 2025 dan 5.523 korban pada kurun Januari hingga 7 April 2026 (Lopes, 2026). Jika dikaitkan dengan apa yang telah kita bahas dalam artikel ini, Kota Bogor menjadi salah satu yang merepresentasikan kondisi ini. Di Kota Bogor terdapat kepemilikan SPPG oleh Yayasan Bosowa Bina Insani. Bosowa merupakan bagian dari Bosowa Group, kelompok usaha nasional yang didirikan oleh H.M. Aksa Mahmud dan bergerak di sektor energi, otomotif, serta properti. Aksa Mahmud dan putranya, Erwin Aksa, diketahui sebagai politisi Partai Golkar. Erwin Aksa pada Pemilu 2024 menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo–Gibran dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 (Tirto.id, 2024). Aksa Mahmud juga memiliki relasi kekerabatan dengan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melalui istrinya, Ramlah Kalla. Yayasan Bosowa Bina Insani merupakan salah satu yayasan yang terlibat dalam pendistribusian paket MBG yang kemudian dilaporkan menyebabkan 223 siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan tersebut pada Selasa, 6 Mei 2025 (Dany, 2025). Dengan demikian, kasus keracunan massal ini memperlihatkan bahwa praktik distribusi akses yang lebih menekankan kedekatan politik dibandingkan kapasitas teknis pada akhirnya menciptakan konsekuensi nyata berupa kegagalan pelayanan publik yang langsung ditanggung oleh masyarakat sebagai penerima program.

Selain itu, investigasi Tempo (2025) memperlihatkan konsekuensi langsung dari absennya standar kompetensi tersebut. Temuan CISDI menunjukkan bahwa banyak yayasan mitra BGN pada praktiknya tidak menjalankan sendiri operasional penyediaan makanan, melainkan bekerja sama dengan subkontraktor berupa perusahaan katering yang telah memiliki dapur, peralatan, dan tenaga masak profesional. Situasi ini menunjukkan bahwa yayasan-yayasan tersebut sering kali hanya berfungsi sebagai pemegang akses administratif terhadap proyek negara, sementara pekerjaan teknis yang sesungguhnya dialihkan kepada pihak lain. Masalahnya, skema subkontrak tersebut berlangsung tanpa regulasi maupun petunjuk teknis yang jelas dari BGN. Tidak terdapat standar transparan mengenai mekanisme pemilihan subkontraktor, pembagian keuntungan, ataupun sistem pengawasan kualitas layanan. Akibatnya, ruang distribusi proyek menjadi sangat rentan terhadap praktik rente dan percaloan proyek negara.

Berdasarkan investigasi Tempo (2025), kasus yang dialami Ira Mesra Destiawati di Kalibata juga menjadi ilustrasi mengenai dampak dari model distribusi semacam ini. Ira, seorang pengusaha katering, menginvestasikan sekitar Rp2 miliar untuk merenovasi bangunan agar sesuai dengan standar BGN dan telah memasak sekitar 65 ribu porsi makanan sejak Februari 2025. Namun, ketika proses pembayaran dilakukan, ditemukan adanya selisih harga dan sebagian pembayaran tidak diterima karena dana digunakan oleh yayasan mitra untuk kebutuhan lain. Situasi ini memperlihatkan ketimpangan struktur relasi antara pemegang akses proyek dengan pelaksana teknis di lapangan. Pihak yang memiliki kompetensi dan melakukan pekerjaan nyata justru berada pada posisi subordinat, sementara pihak yang memperoleh akses administratif dapat mengambil keuntungan dari posisi politiknya sebagai mitra resmi BGN.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa absennya standar kompetensi merupakan konsekuensi langsung dari pola distribusi klientelistik. Ketika akses program ditentukan oleh kedekatan politik, maka kapasitas teknis menjadi tidak relevan selama aktor yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jaringan patronase yang tepat. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan distorsi serius terhadap tata kelola program kesejahteraan. Program publik yang seharusnya berorientasi pada efektivitas layanan dan kualitas distribusi berpotensi berubah menjadi arena ekstraksi rente bagi jaringan politik tertentu. Akibatnya, kualitas pelayanan kepada penerima manfaat menjadi rentan dikorbankan demi mempertahankan distribusi keuntungan di antara elite dan broker politik yang memperoleh akses program.

KESIMPULAN

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa program MBG, khususnya dalam distribusi akses pengelolaan SPPG, mengindikasikan adanya pola klientelistik sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *citizen–politician linkag*es Kitschelt dan Wilkinson (2007). Distribusi akses berlangsung secara selektif kepada jaringan yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintahan, yakni mulai dari kader Partai Gerindra, relawan Pilpres 2024, keluarga elite politik, hingga institusi TNI dan Polri. Pola tersebut diperkuat oleh adanya *vacuum* regulasi, besarnya diskresi BGN, konflik kepentingan internal, serta mekanisme *monitoring* informal berbasis loyalitas politik dan hubungan personal. Dalam konteks ini, program MBG berpotensi berfungsi sebagai instrumen distribusi patronase untuk memperkuat dan memperluas jaringan loyalitas politik di sekitar pemerintahan.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa kecenderungan klientelistik dalam program MBG tidak berhenti pada persoalan tata kelola politik, tetapi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Ketika akses terhadap proyek negara lebih ditentukan oleh kedekatan politik dibanding kapasitas teknis, maka kualitas implementasi program menjadi rentan mengalami distorsi. Absennya standar kompetensi, praktik subkontrak informal, serta dominasi yayasan yang tidak memiliki pengalaman di bidang pangan dan gizi

memperlihatkan bahwa logika patronase berpotensi menggeser logika pelayanan publik. Konsekuensinya terlihat nyata dalam berbagai kasus keracunan massal pada penerima manfaat MBG. Dengan demikian, kasus MBG memperlihatkan bagaimana program kesejahteraan dengan anggaran sangat besar berpotensi berubah menjadi arena reproduksi patronase politik ketika dijalankan tanpa regulasi yang kuat, mekanisme akuntabilitas yang transparan, dan sistem seleksi berbasis kompetensi. Temuan ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam lanskap politik Indonesia pasca Pemilu 2024, karena mengindikasikan bagaimana program sosial berskala besar dengan anggaran sangat tinggi dapat berpotensi digunakan sebagai medium konsolidasi kekuasaan melalui pola-pola klientelistik yang menghubungkan distribusi sumber daya negara dengan pembentukan dan pemeliharaan loyalitas politik, secara nasional.

REFERENSI

Arif, A. (2026, March 12). *MBG dan Ekonomi Dapur*. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/mbg-nomics-atau-ekonomi-dapur-elit

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.

BGN. (2025). *BGN akan Memulai Program MBG Secara Bertahap.* Bgn.go.id. https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-secara-bertahap

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.

Dany, W. (2025, November 15). *Kasus Berulang, 50 Murid di Bogor Keracunan MBG*. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/kasus-berulang-50-murid-keracunan-mbg-di-kota-bogor

Eisenstadt, S. N., & Roniger, L. (1984). *Patrons, clients, and friends: Interpersonal relations and the structure of trust in society.* Cambridge University Press.

Grindle, M. S. (2012). *Jobs for the boys: Patronage and the state in comparative perspective.* Harvard University Press.

Hadiz, V. (2003). Reorganizing political power in Indonesia: A reconsideration of so-called "democratic transitions." *The Pacific Review*, 16(4), 591–611. https://doi.org/10.1080/0951274032000132272

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective.* Stanford University Press.

Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289–310. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508

Hopkin, J. (2006). *Conceptualizing political clientelism: Political exchange and democratic theory.* Paper presented at the APSA Annual Meeting, Philadelphia.

ICW. (2025). *Ada Siapa di Balik MBG? Politik Patronase Untuk Memperkuat Dukungan.* Indonesia Corruption Watch

Investigasi Tempo. (2025, April 20). *Kroni Prabowo Makan Bergizi Gratis. Tempo*. https://www.tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283

Kitschelt, H. (2000). Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities. *Comparative Political Studies,* 33(6-7), 845-879. https://doi.org/10.1177/001041400003300607

Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (Eds.). (2007). *Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition.* Cambridge University Press.

Kopecký, P., Mair, P., & Spirova, M. (Eds.). (2012). *Party patronage and party government in European democracies.* Oxford University Press.

Lopes, M. (2026, April 9). *Sejak 2025, Sebanyak 33.626 Pelajar Jadi Korban Keracunan MBG.* Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/sejak-2025-sebanyak-33626-pelajar-jadi-korban-keracunan-mbg

Mardianti, D. L., & Chairunnisa, N. (2026, February 25). *BGN: SPPG Bisa Dapat Insentif Rp 144 Juta Per Bulan.* Tempo; PT Tempo Inti Media. https://www.tempo.co/politik/bgn-sppg-bisa-dapat-insentif-rp-144-juta-per-bulan-2117637

Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia.* NUS Press.

Muhamad, N. (2025, August 15). RAPBN 2026: *Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp335 Triliun.* Katadata.co.id; Databoks. https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/689c504a56ce6/rapbn-2026-anggaran-makan-bergizi-gratis-rp335-triliun

Piattoni, S. (Ed.). (2001). *Clientelism, interests, and democratic representation: The European experience in historical and comparative perspective*. Cambridge University Press.

Raden, & Trianita, L. (2025, March 10). *Ketua KPK Ingatkan 4 Hal Penting dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.* Tempo; PT Tempo Inti Media. https://www.tempo.co/hukum/ketua-kpk-ingatkan-4-hal-penting-dalam-pelaksanaan-makan-bergizi-gratis-1217536

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004*). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets.* Routledge.

Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*, 66(1), 91–113. https://doi.org/10.2307/1959280

Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). B*rokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics.* Cambridge University Press.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.).* SAGE Publications.